



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Biarkan KPK Tangani Kasus Ini Hingga Ada Putusan  
Tanggal : Sabtu, 11 Februari 2017  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 5

### ■ TB SOENMANDJAJA Anggota MKD DPR

## Biarkan KPK Tangani Kasus Ini Hingga Ada Putusan



**ANGGOTA** Mahkamah Ke-hormatan Dewan (MKD) DPR TB Soenmandjaja mengatakan, pihaknya tidak bisa memproses lebih lanjut dua anggota Komisi V DPR, Yudi Widiana dan Musa Zainuddin yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Maluku.

Sebab, MKD hanya memproses kasus berdasarkan aduan dari pihak lain. "Jadi, biarkan saja KPK menangani kasus itu sampai tuntas hingga ada putusan tetap dari pengadilan," ujar Soenmandjaja di Jakarta.

Bila sudah ada putusan tetap dari pengadilan, kata politikus PKS ini, pihak KPK biasanya akan menyurati MKD DPR untuk memproses lebih lanjut anggota Dewan yang terlibat perkara korupsi. "Biasanya fraksi yang menaungi anggota Dewan tersebut, akan menyiapkan penggantinya," ujarnya.

Soenmandjaja menambahkan, jabatan anggota DPR ber-

beda dengan jabatan eksekutif yang harus non aktif bila berstatus terdakwa. "Selama yang bersangkutan masih bisa mengikuti kegiatan di DPR, maka selama itu pula dia aktif sebagai anggota Dewan," katanya.

Lain halnya, lanjut dia, bila anggota Dewan telah ditahan oleh lembaga penegak hukum, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan di DPR selama beberapa bulan, maka yang bersangkutan otomatis gugur sebagai anggota Dewan.

"Fraksi bisa langsung menyiapkan pergantian antar waktu atau PAW," ujarnya.

Terkait masih banyaknya anggota Dewan yang terseret kasus korupsi, Soenmandjaja menyebut hal itu kembali kepada moralitas masing-masing anggota. Sebab, segala aturan yang melarang anggota Dewan melakukan korupsi sudah lengkap dan tergantung pelaksanaan di lapangan.

"Yang penting, bagaimana tidak tercipta iklim atau peluang yang membuat anggota Dewan menjadi tergoda untuk melakukan korupsi," tandasnya.

Selain itu, lanjut dia, harus ada peraturan yang tegas dan jangan multi tafsir, sehingga rawan disalahgunakan. "Tapi yang penting adalah kembali ke mental masing-masing anggota Dewan," ucapnya.

Selama mental anggota Dewan kuat, kata dia, maka sekuat apapun godaan yang datang, tidak akan membuat anggota tergelincir melakukan tindak pidana korupsi. ■ TIF